



KERJASAMA INDONESIA DAN SPANYOL DALAM MENANGANI AKSI TERORISME TAHUN 2015

Ermanila Supandi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Indonesia establish a cooperation on terrorism with Spain in 2015. This cooperation is one of Indonesia's support for the terrorism campaign led by the US after the of September 11, 2001 events. Indonesia is one of the international actors who are also incorporated in the international system. Meaning that, Indonesian political behavior is also influenced by systems and international politics. It also conveys that in responding to the issue of terrorism globally, Indonesia should cooperate with another country, one being with Spain. However, the events of terrorism in Indonesia and Spain have no connection. This study aims to explain why Indonesia cooperates with Spain regarding terrorism. Qualitative research methods, with explanative types, are used in this study to discuss the factors that encourage Indonesia to collaborate with Spain. Meanwhile, the framework used in this research is Foreign Policy Analysis delivered by David Singer with the unit of analysis (dependent variable) of the country and explanation unit international system / global system.

Keywords: cooperation, terrorism, nation states, international system.

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang melibatkan bukan hanya satu negara, dan mengancam perdamaian dan serta keamanan dunia. Istilah terorisme mulai muncul dan berkembang sejak peristiwa 9/11 yang mengakibatkan adanya penyakit *Islamophobia*¹. Carl Ernst (2013), Seorang Profesor Studi Keislaman di University of North Carolina, Chapel Hill dalam bukunya *Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance*, menjelaskan bahwa fenomena *Islamophobia* di Amerika Serikat bukan hanya menjangkiti komunitas agama, khususnya Kristen dan Yahudi, tetapi juga komunitas non-agama seperti kaum ateis, non-ateis, sekularis, agnostik, dan sebagainya. Selain itu, kalangan non-akademik, komunitas akademik juga banyak yang terjangkit penyakit *Islamophobia* ini. Begitu pula kalangan politisi, *policy makers*, birokrat, wartawan, tokoh agama maupun masyarakat awam.

Sejak peristiwa 9/11 Amerika Serikat menjadi target serangan terorisme. Selain Amerika Serikat sejumlah negara di Eropa kerap mengalami serangan dari kelompok teroris terutama negara-negara yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Spanyol adalah salah satu negara yang menjadi target serangan teroris di Eropa. Spanyol sebelumnya tidak mengalami serangan teror seperti Inggris, Prancis, dan Belgia. Pada tanggal 11 Maret 2004 di Madrid

¹ *Islamophobia* atau *Islamfobia* adalah "penyakit psikologis" yang mengacu pada pengertian ketakutan atau kekhawatiran berlebihan terhadap agama Islam dan kaum sehingga memunculkan sikap antipati terhadap Islam.

merupakan peristiwa yang mengawaliwacana kontraterorisme di Spanyol. Aksi terorisme yang megebom beberapa kereta api di ibu kota Madrid dan menewaskan 191 orang (BBC.com/2017). Serangan terakhir yang terjadi di Spanyol adalah pada bulan Agustus 2017 lalu. Sebanyak 13 orang meninggal dan 100 orang cedera. ISIS mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Las Ramblas melalui situs Amaq. ISIS menyatakan bahwa ini merupakan aksi balas dendam terhadap negara koalisi Amerika Serikat (Azarya 2017).

Bukan hanya di Eropa, keberadaan teroris juga menyebar hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia peristiwa Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005) menjadi peristiwa yang mengawaliwacana dan praktik kontraterorisme di Indonesia. Respon Indonesia cukup cepat dan tanggap dalam merespon isu tersebut dengan bantuan dari negara korban dalam peristiwa tersebut. Salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan Australia. Indonesia semakin menyadari akan ancaman keamanan dan kerugian negara yang diakibatkan oleh aksi teror.

Pada tanggal 20 Oktober 2015 Indonesia dan Spanyol menandatangani MoU spesifik bidang terorisme. Kerjasama ini di tandatangani di di kantor pusat *Centro de Intelegencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado* (Pusat Inteligen Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Terorganisir/CITCO)² di Madrid. Indonesia diwakili oleh Kapala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisariss Jenderal Polisi Saad Usman Nasution dan pihak Spanyol Sekretaris Negara Bidang Keamanan Kerajaan Francisco Martínez Vazque (Detik 2015).

Kerjasama ini diinisiasi dan ditawarkan oleh Jose Maria Matres Manso yang saat ini merupakan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia. Sebelumnya Jose Maria merupakan Duta Besar Spanyol untuk Mali. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto bahwa Jose Maria dikenal telah berpengalaman dalam menangani aksi terorisme. Hal dilihat bagaimana Jose Maria dapat meredam konflik terorisme di Mali (Kristian 2017).

Kerjasama yang disepakati dalam MoU tersebut meliputi pertukaran informasi inteligen dan informasi strategis terkait organisasi teroris dan kecenderungan kejahatan yang berkembang di kedua negara, meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dan penegak hukum, serta saling bertukar pengalaman dalam penanggulangan teroris. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dilaksanakan oleh BNPT dan CITCO dengan membentuk kelompok kerjasama sesuai dengan bidang-bidang yang telah disepakati untuk dikerjasamakan (Detik, 2015).

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang upaya Indonesia melakukan kerjasama dengan Spanyol dalam menangani aksi terorisme pda tahun 2015. Hal ini dikarenakan peristiwa terorisme di Indonesia dan Spanyol tidak memiliki keterkaitan baik dari segi korban maupun pelaku. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa teroris terbesar di Indonesia, Bom Bali I (2002) dan II (2005). Dilihat dari korban, sebagian besar korban dari peristiwa Bom Bali berkewarganegaraan Australia, Indonesia dan Britania Raya serta beberapa dari Negara Eropa serta beberapa dari Asia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa ataupun sekitar Eropa lainnya, misalnya Turki yang juga merupakan negara yang berpotensi secara langsung bersinggungan langsung dengan kegiatan terorisme. Salah satunya masalah terorisme terkait *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Indonesia juga memberikan respon dan turut dalam meningkatkan kerjasamanya dengan Turki terkait terorisme ini. Akan tetapi hingga saat ini belum ada

²CICTO adalah badan intelijen domestic Spanyol yang bertanggungjawab untuk pencegahan terorisme domestik, kejahatan terorganisir dan organisasi radikal kekerasan lainnya dengan mengelola dan menganalisis semua informasi internal negara. Dibentuk pada Oktober 2014 (en.wikipedia.org).

kerjasama yang secara legal ditandatangani oleh kedua negara. Masih hanya dalam bentuk seruan dan dukungan, padahal negara Turki merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi yang sangat strategis untuk memerangi terorisme. Melihat negara ini salah satu negara yang banyak dilalui oleh ISIS yang pergi menuju Suriah. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama Indonesia dengan Spanyol terkait terorisme. Oleh karena itu manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman terkait upaya kerjasama Indonesia dengan Spanyol dalam menangani aksi terorisme pada tahun 2015.

Pembahasan

Faktor Pendorong Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Spanyol dalam Menangani Aksi Terorisme pada Tahun 2015

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Spanyol dalam menangani aksi terorisme merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap UN dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Kerjasama ini merupakan implementasi dari UN *Global Counter Terrorism Strategy* yang diadopsi negara anggota UN pada 8 September 2006. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Spanyol terkait terorisme tidak lepas dari pengaruh proses politik. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan dalam membuat kerjasama tersebut mendapat pengaruh dari beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor dari luar negara Indonesia (eksternal), yaitu sistem internasional.

Setelah adanya kampanye anti terorisme yang dipimpin oleh AS secara tidak langsung membentuk negara-negara di dunia dalam dua kelompok besar. Bergabung sebagai koalisi AS sebagai penentang terorisme atau menolak bergabung dengan AS dengan asumsi sebagai pendukung kelompok terorisme. Dengan kata lain negara tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan AS jika tidak ingin disebut negara terorisme. Kemudian banyak negara yang bergabung dalam organisasi internasional yang dibentuk sebagai bentuk kerjasama negara-negara pendukung kampanye anti terorisme ini. Dengan mengatasnamakan keamanan dan perdamaian dunia.

PBB adalah salah satu lembaga internasional yang bertugas menjaga keamanan dunia dari segala ancaman termasuk terorisme. Sebagai lembaga internasional yang menjaga keamanan dunia, dalam melaksanakan tugasnya dibidang terorisme PBB menciptakan 13 konvensi dan 16 instrumen legal universal yang berkaitan dengan terorisme. Peraturan-peraturan tersebut berlaku wajib bagi seluruh negara anggota PBB. Beberapa konvensi/perjanjian yang menjadi rezim internasional berkaitan dengan terorisme misalnya, *Universal Declaration of Human Right* 1948, Konvensi-konvensi den Haag 1907 (Hukum den Haag), Konvensi-konvensi jenewa 1949 (Hukum Jenewa), *Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft* tahun 1963 (Konvensi Aircraft), *Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* tahun 1970 (*Unlawful Seizure Convention*), *Convention for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation* tahun 1971 (*Civil Aviation Convention*), *Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons* tahun 1973 (*Diplomatic Agents Convention*), *International Convention against The Taking of Hostages* tahun 1979 (*Hostages Convention*), *Convention on The Physical Protection of Nuclear Materil* tahun 1979 (Fitrah 2013).

Upaya Indonesia dalam Menangani Aksi Terorisme

Rosand dalam Rachmat (2015) menjelaskan bahwa dalam upaya pemberantasan terorisme PBB mendorong organisasi kawasan melalui 4 (empat) pilar, yakni; (1) menekan upaya mencegah terciptanya kondisi ideal bagi penyebaran terorisme; (2) melakukan tindakan untuk mencegah dan memerangi terorisme; (3) melakukan upaya untuk membangun

kapabilitas negara untuk mencegah dan memerangi terorisme dan memperkuat sistem dalam PBB untuk kepentingan tersebut, dan; (4) melakukan tindakan dalam upaya untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hukum sebagai dasar upaya pemberantasan terorisme. Selain empat pilar tersebut PBB juga menggelar dialog secara multilateral, salah satunya *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF). Forum ini bertujuan untuk berbagi pengalaman bagi para negara anggota terkait upaya pemberantasan, pergerakan terorisme, pertukaran informasi inteligen, serta potensi ancaman.

Melihat ancaman terorisme secara global bentuk kerjasama bilateral, regional, maupun internasional banyak dilakukan. Terutama kerjasama intelijen seperti NATO, EU, OSCE di Eropa dan ASEAN di Asia Tenggara. Pertukaran informasi antar negara ASEAN sangat membantu dalam menggagalkan aksi serangan terorisme di Asia Tenggara. Demikianpun kerjasama yang dilakukan oleh AS dan negara-negara Eropa lainnya karena disinyalir terdapat sel-sel jaringan terorisme yang sudah lama beroperasi di berbagai negara di Eropa (Jemadu 2008).

Indonesia bergabung dan menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950, secara langsung Indonesia berkewajiban untuk mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan PBB. Sejak bergabung dalam organisasi internasional PBB Indonesia memiliki banyak peran dalam forum PBB, antara lain sebagai Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, dan Dewan Keamanan PBB (tidak tetap). Sebanyak empat kali Indonesia terpilih dan dipercaya sebagai Dewan Keamanan tidak tetap oleh PBB, yakni pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia kemudian terpilih kembali untuk periode 2019-2020 mendatang. Selain itu negara yang terpilih menjadi anggota DK PBB tidak tetap antara lain Jerman dan Belgia yang mewakili kelompok Eropa Barat, Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Selatan yang mewakili Afrika. Lima negara anggota tidak tetap lainnya adalah Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia (Santi 2018). Posisi Indonesia yang terpilih sebagai Dewan Keamanan PBB (tidak tetap) selama empat kali periode menunjukkan bahwa Indonesia tetap berperan aktif dalam kegiatan organisasi internasional dan sistem internasional. Terutama dalam hal isu keamanan dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Hal ini mendukung Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara lain maupun organisasi internasional lainnya.

Indonesia berperan aktif melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi kontra terorisme seperti *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC), dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED). Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) (kemlu.go.id/id, 2016).

Bukan hanya dengan organisasi-organisasi internasional, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral bidang terorisme dengan negara lain salah satunya Spanyol. Spanyol merupakan negara yang tergabung dalam PBB sejak tahun. Sebagai keanggotaannya dalam organisasi internasional PBB, Spanyol memberikan banyak kontribusi. Salah satunya sebagai Dewan Hak Asasi Manusia. Spanyol mengambil mandatnya sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk kedua kalinya pada 1 Januari 2018, yang telah dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertemuan yang diadakan di New York pada 16 Oktober lalu. Setelah sebelumnya dengan mandat pertamanya pada periode tahun 2011 hingga 2013 (un.org 2018).

Jemadu (2008) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia yang sudah lama menerapkan sistem demokrasi. Perestasi Indonesia dalam menangani aksi terorisme membuat negara Barat meyakini bahwa Indonesia dapat menjadi wajah Islam

yang lebih moderat dan toleran. Pemerintah Indonesia selalu berupaya menyampaikan pesan ini dalam berbagai pertemuan internasional maupun regional. Sebagai contoh, saat Menteri Hasan Wirajuda memberikan pidato di depan Majelis Umum PBB ke 59 di New York pada tanggal 27 September 2004 dan menyatakan secara terbuka keinginan Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menteri Hasan Wirajuda mengungkapkan bahwa:

“a developing country striving not only for social and economic progress but also for democratization must have a voice on the Security Council. Moderate Islam must have a voice on the Council”

Kerjasama Internasional Indonesia-Spanyol dalam Menanggulangi Aksi Terorisme

Pasca Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005 membuat Indonesia lebih serius dalam menangani aksi terorisme. Pada tahun 2002, Presiden Megawati mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan secara yurisdiksi terkait penanggulangan terorisme. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 pada peristiwa Bom Bali I, Inpres No. 4 Tahun 2002, dan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Selain itu pemerintah Megawati juga membentuk lembaga baru yang dirancang secara khusus untuk menangani kasus terorisme seperti Densus 88 (Detasemen Khusus) pada tahun (2004) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada tahun 2010 (Wuryandari 2014, pp. 73).

Sedangkan, dalam konteks internasional Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk menangani ancaman terorisme. Secara bilateral Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai negara antara lain Australia dan AS. Secara regional Indonesia melakukan kerjasama dengan ASEAN (Puspitasari 2010, pp. 4). Kemudian pada tahun 2005, Presiden SBY memperkuat kerjasama terkait terorisme dengan Australia dengan menyepakati perjanjian pertahanan keamanan dalam kunjungannya ke Australia. Kerjasama ini dalam rangka perang melawan terorisme internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional terutama yang berkaitan dengan ancaman keamanan membuat Indonesia harus aktif dan tanggap dalam menghadapi isu internasional seperti terorisme. Organisasi internasional yang bergerak dibidang keamanan internasional, yang mana Indonesia merupakan anggota mendukung dan memberikan bantuan dalam hal menangani aksi terorisme. Salah satunya sebagaimana yang dilakukan oleh *Terrorism Prevention Branch (TPB) United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang membantu BNPT dalam mencegah dan menangani aksi terorisme.

Dilihat dari sejarah penyerangan terorisme, teroris banyak menyerang wilayah-wilayah di Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa target utama terorisme adalah negara Barat terutama Amerika Serikat. Ditambah lagi setelah AS menyerukan slogan retorikal “berperang melawan terorisme” dalam koalisi *Global War on Terrorism (GWOT)*. Sehingga pasca peristiwa 11 September 2001 bukan hanya AS yang menjadi target. Tetapi juga sejumlah negara Eropa lainnya seperti; Inggris, Prancis, dan Spanyol dan negara-negara koalisinya. Kemudian menyebar hingga sampai ke Asia Tenggara dan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia melakukan kerjasama kontra terorisme dengan negara-negara Eropa, salah satunya Spanyol.

Sebagai negara pendukung penuh kampanye anti terorisme, Indonesia tentunya sudah melakukan kerjasama dengan AS. Hal ini cukup menjadi alasan yang kuat untuk menjalin

kerjasama antara AS dan Indonesia. Bukan hanya Indonesia, semua negara yang menyerukan dukungan terhadap kampanye anti terorisme tentu saja telah melakukan kerjasama dengan AS selaku pemimpin kampanye. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Australia terkait terorisme pasca serangan Bom Bali I dan II. Alasan kerjasama Indonesia dengan Australia cukup kuat dan jelas melihat korban dan tempat kejadian. Selain itu, masih banyak kerjasama anti terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara barat. Misalnya dengan Inggris, Prancis, Selandia Baru, Polandia, dan bahkan dengan Uni Eropa.

Kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara barat menunjukkan bahwa Indonesia memang berkomitmen dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia dari ancaman terorisme. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah melakukan kerjasama dengan negara lain terutama negara-negara anggota PBB yang juga tergabung dalam UN *Global Counter Terrorism Strategy*.

Dalam melakukan kebijakan terkait terorisme, Indonesia mendapat bantuan dari organisasi-organisasi internasional, seperti TPB UNODC. Dalam rangka membantu Indonesia menanggulangi aksi terorisme, poin ke tiga TPB UNODC sebagai salah satu lembaga UN memberikan bantuan dan fasilitas kepada Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Keberadaan TPB UNODC sebagai lembaga yang membantu negara Indonesia dalam melakukan kebijakan terkait terorisme serta dukungan terhadap UN *Global Terrorism Strategy* mendorong Indonesia untuk memberikan respon terhadap isu internasional. Terutama isu yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia seperti terorisme. Berdasarkan fakta inilah kemudian Indonesia melakukan kerjasama dengan Spanyol. Kerjasama yang secara spesifik dibidang terorisme yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan komitmen dan tujuan yang sama, yakni menjaga keamanan dan perdamaian dunia dari ancaman terorisme.

Kesimpulan

Peristiwa 11 September 2001 telah membuat sejarah baru bagi peradaban dunia. Peristiwa ini membawa isu terorisme semakin memanas di masyarakat internasional. Terlebih negara yang diserang pada saat itu adalah Amerika Serikat, sehingga Presiden Bush yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden AS untuk pertama kalinya menyerukan War on terror. Sejak adanya seruan War on Terror yang dipimpin oleh AS, telah membagi negara di dunia dalam dua terbagi dalam dua kubu. Negara tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan AS dalam Global War on Terror atau jika tidak akan dianggap sebagai pendukung Terrorism.

Kemudian AS juga menyerukan akan membantu setiap negara yang ikut dalam koalisinya untuk bekerjasama dan memberikan bantuan kepada negara tersebut baik secara militer maupun ekonomi. Oleh sebab itu, seruan ini mendapat respon baik dari berbagai negara sehingga banyak yang melakukan kerjasama, bukan hanya dengan AS. tetapi juga antar negara lainnya dengan berlandaskan *Global Counter Terrorism*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis di bab-bab sebelumnya dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan kerja sama dengan Spanyol dibidang terorisme pada tahun 2015 merupakan respon negara Indonesia sebagai salah satu aktor internasional terhadap isu global. Selain itu kerjasama ini juga merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani aksi terorisme. Dengan pemaknaan yang sama dalam sistem internasional bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia dan harus diperangi.

Selain itu, kerjasama ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia melalui BNPT yang mendapat bantuan, dukungan, dan mandap penuh dari *Terrorism Prevention Branch (TPB) of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* atau biasa disebut TPB-UNODC. Peran TPB-UNODC sebagai lembaga khusus *United Nation* yang khusus

menangani kasus terorisme wajib membantu BNPT sebagai lembaga negara (domestik) Indonesia dalam menangani kasus terorisme.

Referensi

- Azarya Hanna Samosir. (2017). Aksi Teror di Dekat Barcelona, 4 Pelaku Tewas [online]. *CNN*, 18 Agustus. Terdapat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170818075149-134-235543/aksi-teror-di-dekat-barcelona-4-pelaku-tewas> [diakses pada 27 September 2018].
- Bakry, Suryadi Umar. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BBC. (2017). Dua serangan teror beruntun, mengapa Spanyol menjadi sasaran? [online], *BBC*, 18 Agustus. Terdapat dalam: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40974539> [diakses 1 November 2017].
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 162.
- Chauvel Richard dkk. 2005. *Indonesia-Australia: Tanangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. ed. 1. Jakarta: Granit.
- David Easton. 2001. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science* (New York: Alfred A. Knopf, 1953), hal. 50, seperti dikutip oleh S.P. Vssssarma, *Teori Politik Modern* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 275.
- David Easton. 1996. *Analisis Sistem Politik*, dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown (ed.), *Perbandingan Politik, terj.* Jakarta: Erlangga, hal 36-39.
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elisabeth . 2016. *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2025*. ed.1; cet.1.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- DetikNews. (2017). Dua Serangan Teror Beruntun, Mengapa Spanyol Menjadi Sasaran? [online], *Detik*, 19 Agustus. Terdapat dalam: <https://news.detik.com/bbc-world/d-3605611/dua-serangan-teror-beruntun-mengapa-spanyol-menjadi-sasaran> [diakses 2 November 2017].
- Fitrah Ladia. (2013). Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme dalam Menjelaskan Tindakan AS dalam Menghadapi Terorisme Al-Qaeda Pasca Serangan 9/11 (2001-2011) [skripsi]. Jakarta (ac.id): Universitas Indonesia.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kemenlu. (2016). Hadiri Retreat, Presiden Jokowi Tekankan Keamanan ASEAN, Kerjasama Maritim, dan Terorisme [online], *Kemenlu*, 8 September. Terdapat dalam: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Hadiri-Retreat,-Presiden-Jokowi-Tekankan-Keamanan-ASEAN,-Kerjasama-Maritim,-dan-Terorisme.aspx> [diases 3 April 2018].
- Rachmat, Angga Nurdin. 2015. *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta
- Santi Natalia. (2018). DK PBB, Indonesia Bisa Lebih Berperan dalam Perdamaian Dunia [online], *CNN*, 10 Mei. Terdapat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180609120311-134-304791/dk-pbb-indonesia-bisa-lebih-berperan-dalam-perdamaian-dunia> [diakses 18 November 2018].
- Un.org. (2018). General Debate General Assembly of the United Nations [online]. *Un.org*, 24 September. Terdapat dalam <http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/24sep/spain.shtml> [diakses pada 18 November 2018].
- Un.org. (2001). Resolution 1368 2001 [online]. *Un.org*, 12 Setember. Terdapat dalam: <https://documents-dds->

- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement
[diakses pada 6 November 2018].
- un.org. (2018). Security Council Unanimously Adopts Wide-Ranging Anti-Terrorism Resolution; Calls For Suppressing Financing, Improving International Cooperation [online]. *Un.org*, Maret. Terdapat dalam:
<https://www.un.org/press/en/2001/sc7158.doc.htm> [diakses pada 16 Maret 2018].
- un.org. (2018). United Nations General Assembly Adopts Global Counter-Terrorism Strategy [online]. *Un.org*, Maret. Terdapat dalam:
<https://www.un.org/counterterrorism/ctif/en/united-nations-general-assembly-adopts-global-counter-terrorism-strategy> [diakses pada 16 Maret 2018].
- Wuryandary Ganewati. (2018). Indonesian Foreign Policy In Dealing With International Terrorism Issue. *Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol.11, No.2, pp. 73-74.